
Menatap Masa Depan Pariwisata Kabupaten Tuban Pasca Pandemi Covid-19

Sri Musrifah^{1*}, Hasanul Bulqiyah², Sri Ulandari³, Bagus Ade Wijaya⁴, M. Davis A.P.⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

¹²³⁴⁵(Jalan Manunggal, no.61, Tuban, Indonesia)

*Penulis Korespondensi: riumay99@gmail.com

Diterima (Received): 12 November 2023 • Direvisi (Revised): 27 November 2023 • Disetujui Publikasi (Accepted): 10 Desember 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze the future of Tuban Regency tourism after the Covid-19 Pandemic by using a policy approach, located in Tuban district, especially in nine islands of one (91) existing tourism locations, as well as quantitative methods in data collection. The results showed that the Covid-19 pandemic has had an economic and social impact on the tourism sector of Tuban regency. Economically, there was a decrease in tourist visits during 2020 or the beginning of the Covid-19 pandemic, plummeting to only 2.8 million visits. Only in 2021 there was an increase of more than 500 thousand visits. Tourist attractions are mostly closed because they follow regulations, so people experience a decrease in income. Socially, there was a reduction in the number of employees and non-payment of Holiday Allowance.

The Covid-19 pandemic is a macro crisis that harms tourism. So multi-sector tourism crisis management is needed to handle it. Prepare organizations and manuals to handle them, capacity to run organizations, related institutions to respond to each crisis, and build tourism crisis networks

Keywords: *The future of tourism, post Covid-19 Pandemic, Tuban*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa masa depan pariwisata Kabupaten Tuban pasca Pandemi Covid-19 Dengan menggunakan pendekatan kebijakan, berlokasi di kabupaten Tuban, khususnya pada sembilan pulih satu (91) lokasi pariwisata yang ada, serta metode kuantitatif dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak secara ekonomi dan sosial terhadap sektor pariwisata kabupaten Tuban. Secara ekonomi, terjadi penurunan kunjungan wisata selama 2020 atau awal pandemi Covid-19, anjlok hingga 2,8 juta kunjungan saja. Baru di tahun 2021 ada kenaikan lebih dari 500 ribu kunjungan. Tempat-tempat wisata sebagian besar tutup karena mengikuti regulasi, sehingga masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Secara sosial, kemudian terjadi pengurangan jumlah karyawan dan tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya.

Pandemi Covid-19 merupakan krisis makro yang merugikan pariwisata. Sehingga diperlukan manajemen krisis pariwisata multisektor untuk menanganinya. Menyiapkan organisasi dan manual untuk menanganinya, kapasitas dalam menjalankan organisasi, lembaga terkait untuk merespon setiap krisis, serta membangun jaringan krisis pariwisata

Kata Kunci: *Masa depan pariwisata, pasca Pandemi Covid-19, Tuban*

Silahkan mengutip artikel ini sebagai: Musrifah, S., Bulqiyah, H., Ulandari, S., Wijaya, B.A., Pratama, M.D.A. (2023). Menatap Masa Depan Pariwisata Kabupaten Tuban Pasca Pandemi Covid-19. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVVS)*, 1(2), 167-182. <https://doi.org/10.0005/poligovs.v1i2.1096>

PENDAHULUAN

Jika diamati, pandemi COVID-19 tidak hanya memengaruhi kesehatan publik tetapi juga perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial di Indonesia. Karena pandemi ini, banyak pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang membatasi aktivitas masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Penurunan aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama mereka yang rentan dan miskin (Institute, n.d.). Industri pariwisata Indonesia sangat terpengaruh oleh Pandemi Covid-19 karena berhubungan dengan industri lain seperti perhotelan, transportasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama yang menghasilkan produk seperti cendera mata, kuliner, restoran, biro perjalanan wisata, dan pemandu wisata.

Sudah banyak riset yang mengkaji tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, dimana mayoritas menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta kajian pustaka. Sedangkan riset yang mengkaji dampak Pandemi Covid-19 yang dikaji secara deskriptif kuantitatif masih sangat terbatas. Peneliti hanya menemukan satu artikel yang membahasnya, yaitu tulisan dari Soehardi, Dyah Ayu permatasari dan Janfry Sihite. Studi ini fokus pada penurunan pendapatan tempat wisata dan hiburan serta kinerja karyawan pariwisata di Jakarta selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa sementara tempat wisata dan hiburan ditutup, mereka mendorong pengurangan karyawan, pemotongan gaji dan insentif, serta PHK dan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan pendapatan tempat wisata dan hiburan secara keseluruhan. (Soehardi et al., 2020).

Berdasar studi yang telah Sebuah analisis yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Wahyu Pradana dan Gerry Katon Mahendra tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata di Goa Pindul Gunungkidul menunjukkan penurunan wisatawan yang signifikan. Setiap pedagang di sekitar Goa Pindul kehilangan pekerjaan mereka karena pandemi. Di tengah pandemi COVID-19, para pedagang harus mulai mempertimbangkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Pradana, Muhammad Iqbal Wahyu & Mahendra, 2021). Ini juga berlaku untuk bisnis pariwisata di pesisir Kota Kupang. Semua bisnis pariwisata mengalami penurunan pendapatan sebesar rata-rata 70% tergantung pada jenis usahanya. Misalnya, bisnis makanan menjual pisang kelapa, salome (bakso), gula lontar, ikan laut, kafe, homestay, dan jasa fotografi. Meningkatnya modal, pengurangan tenaga kerja pariwisata, tidak meratanya distribusi keuntungan, penutupan bisnis, dan kerugian lainnya adalah dampak lain yang muncul. (Nugraha, 2021).

Sedangkan kondisi pariwisata di Bali menunjukkan bahwa Kebijakan PSBB tidak memengaruhi minat wisatawan untuk mengunjungi Bali. Sebaliknya, kebijakan protokol kesehatan Covid-19 memengaruhi minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata Bali secara signifikan. (Ayu et al., 2021).

Studi lain menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan untuk memulihkan sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah melalui Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkarekraf) telah merencanakan program dana hibah pariwisata dengan anggaran 3,3 triliun. Program ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi sektor pariwisata dan meningkatkan ekspor dan pemasaran produk ekonomi kreatif melalui digitalisasi. (Ekraf) (Utami & Kafabih, 2021). Selama tahun 2021, industri pariwisata Indonesia mengalami penurunan kunjungan turis, tingkat hunian hotel berbintang, dan pendapatan nasional, dan belasan juta pekerja terancam kehilangan pekerjaan. (Paludi, 2022).

Untuk merespon dampak wabah Covid-19 pada sektor pariwisata, alternatif kebijakan seperti: 1) melindungi mata pencaharian pekerja dengan memberikan bantuan keuangan untuk melindungi pendapatan jutaan pekerja; 2) memberikan keringanan kepada perusahaan dan jutaan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata untuk mencegah keruntuhan; dan 3) injeksi likuiditas dan uang tunai, bantuan arus kas, dan bantuan arus kas, 5) Perlu dirancang dan dikembangkan aplikasi sistem informasi pariwisata berbasis android yang mengumpulkan data industri pariwisata untuk menyediakan data tentang karyawan pariwisata, jenis jasa, daya tarik, dan sarana wisata yang tersebar di seluruh Indonesia; 6) Menurunkan biaya parkir dan pendaratan pesawat, serta menurunkan harga sewa untuk toko dan agen kargo di bandara-bandara di Indonesia; 7) Memberikan beasiswa pelatihan di politeknik pariwisata dan memberikan pendidikan lanjutan di bidang pariwisata, 9) menciptakan lembaga untuk menangani bencana di sektor pariwisata dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota; dan 10) mengembangkan pedoman tata kelola standar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak wabah atau bencana di sektor pariwisata. (Sugihamretha, 2020).

Pariwisata memiliki peran strategis yang signifikan dalam meningkatkan devisa negara, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat. Selain itu, pariwisata telah menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, menjadikannya komponen penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan pariwisata juga mendorong pertumbuhan berbagai sektor bisnis (Ashoer et al., 2021). Selain itu, pariwisata adalah industri yang sangat rentan terhadap krisis dan perubahan, seperti kenaikan harga minyak, wabah penyakit, atau instabilitas politik. Karena itu, kebijakan pariwisata mencakup kebijakan ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan politik, dan mencakup berbagai sektor dan wilayah.. (Nugroho, 2018).

Ada sebelas level krisis makro yang merugikan pariwisata, dampaknya berjenjang dari krisis yang paling buruk hingga kurang buruk.

Tabel 1
Krisis yang Mempengaruhi Sektor Pariwisata

Klasifikasi Krisis	Jenis Krisis
1. Terburuk	Perang
1.	Teroris
3.	Kerusuhan dengan kekerasan
4.	Bencana alam
5.	Wabah penyakit

6.	Politik
7.	Kemerosotan ekonomi
8.	Konflik sosial
9.	Premanisme
10.	Demonstrasi
11. Kurang Buruk	Kasus mikro

Sumber : (Nugroho, 2018)

Dalam penanganan krisis di atas, diperlukan manajemen krisis dengan syarat :

- a. Memiliki organisasi atau Lembaga yang mengelola krisis atau *Office/ Center of Crisis Management* yang bertanggung jawab sebagai hub dari pengelolaan krisis dan operator pengelolaan krisis itu sendiri, ditambah dengan mandat yang cukup untuk menjalankannya.
- b. Mempunyai manual untuk menangani krisis dengan muatan jenis krisis, metode menangani krisis, dan pertanggungjawaban penanganan krisis.
- c. Mempunyai kapasitas kognitif, professional, dan passion untuk menjalankan organisasi.
- d. Menyiapkan lembaga terkait untuk merespon setiap krisis pada jenjang yang relevan dihadapi.
- e. Membangun jaringan krisis pariwisata (Nugroho, 2018)

Dari beberapa riset di atas, memberi peluang kepada peneliti untuk menelaah lebih dalam tentang pariwisata Kabupaten Tuban pasca Pandemi Covid-19 secara deskriptif kuantitatif.

METODE PENELITIAN

Dalam memahami pariwisata Kabupaten Tuban pasca Pandemi Covid-19, penulis menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini melihat semua objek wisata di kabupaten Tuban, total 91 lokasi, menurut data yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata kabupaten Tuban. Karena populasi kurang dari 100, sampel penelitian ini adalah keseluruhan populasi. Metode pengumpulan data melalui penyebaran angket atau kuesioner dievaluasi kemudian menggunakan statistik deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

PROFIL PENGELOLA OBYEK WISATA DI KABUPATEN TUBAN

Kuesioner penelitian diberikan kepada seluruh pengelola usaha wisata yang ada di kabupaten Tuban. Identitas responden dalam penelitian ini terbagi menjadi lima kategori, yaitu jenis kelamin, usia, status pernikahan, suku dan pendidikan.

Dari kategori jenis kelamin, 90,1% responden adalah laki-laki dan 9,9% perempuan. Sedangkan dari sisi usia, tampak dalam tabel di bawah :

Tabel 2. Usia Pengelola Usaha Wisata di Kabupaten Tuban

Usia	Jumlah	Persentase
< 30 tahun	12	13,2
31-40 tahun	28	30,8
41-50 tahun	31	34
51-60 tahun	14	15,4
> 60 tahun	4	4,4
Tidak menjawab	2	2,2
Jumlah	91	100

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Dari status pernikahan, 99% responden sudah menikah, dan hanya 1% yang belum menikah. Mayoritas responden bersuku Jawa, dengan pendidikan mayoritas tamat SMA (47%). Pengelola obyek wisata dengan jenjang pendidikan tamat S-1 sebanyak 18%, lulusan SMP 14%, lulus SD 8%, tidak sekolah 7%, dan 1% lulusan S-2.

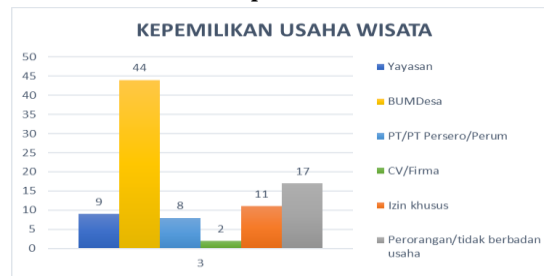
KARAKTERISTIK OBYEK WISATA DI KABUPATEN TUBAN

Dari 91 (Sembilan puluh satu) obyek wisata yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, Klenteng Kwan Sing Bio merupakan lokasi wisata tertua, yang berdiri sejak tahun 1773. Sedangkan Sumber Arum Park, Wisata Krawak dan Pantai Semilir merupakan lokasi wisata termuda yang baru berdiri tahun 2020.

Terkait dengan kepemilikan obyek wisata, 81,89% responden bukanlah pemilik dari obyek wisata yang dikelolanya dan 10,11% merupakan pemilik. Hal ini senada dengan data bahwa 59,3% responden menyatakan bahwa mengelola obyek wisata bukan pekerjaan utama bagi mereka, sedangkan 40,7% responden menjadikan sebagai pekerjaan utama.

Bagaimana dengan status kepemilikan obyek wisata yang ada di Kabupaten Tuban ? 48,3% dimiliki oleh BUMDesa, 18,7% milik perorangan/ tidak berbadan usaha, 12,1% memiliki izin khusus, 9,9% milik Yayasan, 8,8% milik PT/ PT Persero/ Perum, dan 2,2% milik CV/ Firma.

Diagram1. Status Usaha Obyek Wisata di Kabupaten Tuban



Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2023

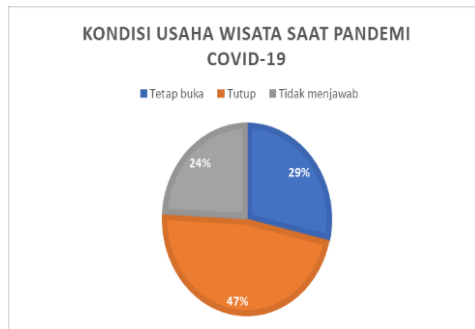
DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19 TERHADAP PARIWISATA KABUPATEN TUBAN

Pariwisata memainkan peran besar dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tuban. Pada tahun 2019, Tuban menerima 7 (tujuh) juta kunjungan, menempati peringkat kedua di Jawa Timur. (Jawa Pos Radar Tuban, n.d.). Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiga tempat wisata yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, meningkat sebesar 100% pada tahun sebelumnya, 2018. Tiga tempat wisata adalah Goa Akbar, Pantai Boom Tuban, dan Kolam Pemandian Bektiharjo di Semanding. (Tuban et al., 2019).

Sektor pariwisata Tuban mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Jumlah pelanggan telah berkurang. Jumlah turis ke Tuban turun hingga 2,8 juta pada awal pandemi COVID-19. Data ini diperoleh dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban. Di tahun 2021, jumlah kunjungan hanya meningkat lebih dari 500 ribu, mencapai 3.413.900 orang. Akibatnya, pemerintah memberlakukan beberapa pembatasan, seperti penutupan semua tempat rekreasi selama tiga bulan pertama pandemi. (Jawa Pos Radar Tuban, n.d.).

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa 47% tempat wisata ditutup selama Pandemi Covid-19, dan hanya 29% yang tetap buka. Sementara itu, 48,4% tempat wisata tetap beroperasi atau tidak pernah tutup, 41,7% berhenti beroperasi karena peraturan yang terkait dengan pandemi (seperti PSBB), 7,7% berhenti beroperasi karena peraturan yang tidak terkait dengan pandemi, dan 2,2% berhenti secara keseluruhan.

Diagram 2. Kondisi Usaha Wisata Saat Pandemi Covid-19



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

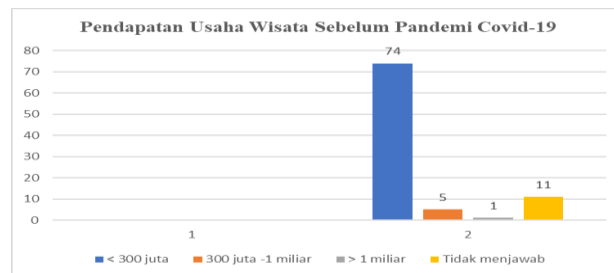
Diagram 3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Operasional Usaha Wisata



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Gambaran pendapatan usaha wisata sebelum Pandemi Covid-19 adalah 81,3% memiliki pendapatan kurang dari 300 juta per tahun, 5 (lima) usaha wisata atau 5,5% memiliki penghasilan 300 juta - 1 miliar, dan 1,1% memiliki pendapatan lebih dari 1 miliar.

Diagram 4. Pendapatan Usaha Wisata Sebelum Pandemi Covid-19

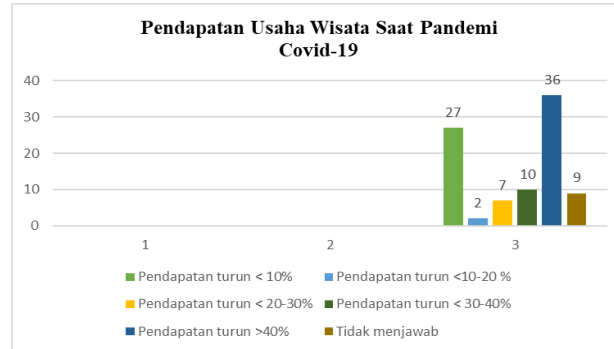


Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Bagaimana pendapatan usaha-usaha wisata saat Pandemi Covid-19, tergambar dalam diagram di bawah ini. Ada 36 usaha wisata (39,6%) yang pendapatannya turun lebih dari 40%, sedangkan 29,6% mengalami penurunan pendapatan sebesar kurang dari 10%,

sebesar 11% mengalami penurunann kurang dari 30% - 40%, 7,7% turun sebesar kurang dari 20% - 30%, dan 2 usaha wisata (2,2%) pendapatannya turun kurang dari 10% - 20%.

Diagram 5. Pendapatan Usaha Wisata Saat Pandemi Covid-19

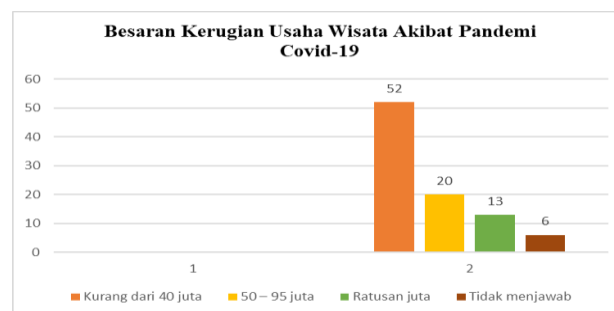


Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Menurut data di atas, pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi Kabupaten Tuban mengalami kontraksi sebesar 5,85 persen pada tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar, atau PSBB, membatasi semua gerak dan aktivitas masyarakat. Ini menyebabkan kerusakan ekonomi lokal, yang berdampak pada banyak sektor lainnya. Salah satu pembatasan tersebut berdampak pada penurunan produksi dan penurunan permintaan di pasar, yang berdampak pada pergerakan ekonomi. (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2022).

Secara detail, bisa kita lihat besaran kerugian yang ditanggung oleh usaha wisata saat Pandemi Covid-19. Ada 52 usaha wisata yang menderita kerugian sebesar kurang dari 40 juta, 20 usaha wisata mengalami kerugisn sebesar 50 – 95 juta, dan 13 usaha wisata mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

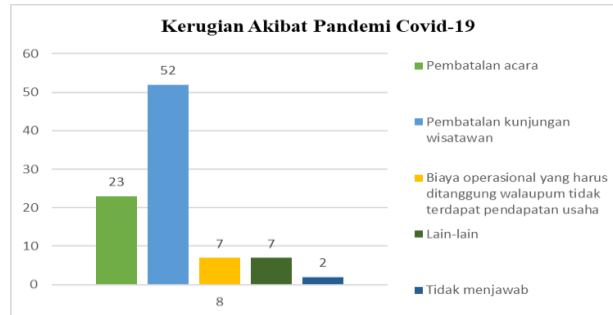
Diagram 6. Besar Kerugian Usaha Wisata Akibat Pandemi Covid-19



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Kerugian usaha wisata ini disebabkan oleh pembatalan kunjungan wisata sebesar 57,1%, pembatalan acara sebesar 25,3%, biaya operasional yang harus ditanggung walaupun tidak terdapat pendapatan usaha sebesar 7,7% serta lain-lain sebesar 7,7%.

Diagram 6. Kerugian Akibat Pandemi Covid-19



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Bagaimana rencana obyek wisata di kabupaten Tuban saat pandemi Covid-19 berakhir ? 86% mengatakan ingin buka kembali, 2% mengatakan tidak buka, dan 2% lagi mengatakan belum tahu.

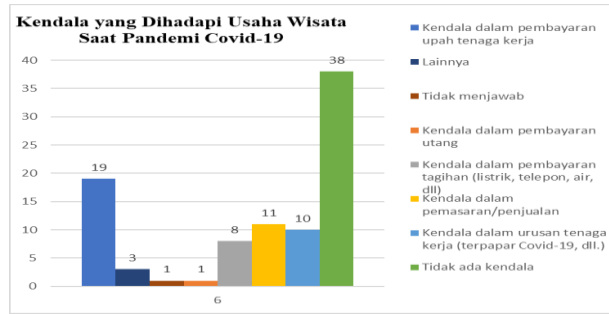
Diagram 7. Rencana Usaha Wisata Ketika Pandemi Covid-19 Berakhir



Sumber: Data penelitian yang diolah, 2023

Selama Pandemi Covid-19 ini berlangsung, ada beberapa kendala yang dialami oleh obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Tuban. Mayoritas (41,7%) menjawab tidak ada kendala, 20,9% mengatakan mengalami kendala dalam pembayaran upah tenaga kerja, 12,1% kendala dalam hal pemasaran/ penjualan, 11% mengalami kendala dalam urusan tenaga kerja (ada karyawan yang terpapar Covid-19), 8,8% berkendala dalam pembayaran tagihan (listrik, telepon, air, dll.), 3,3% mengalami kendala lainnya, dan 1,1% kendala dalam pelunasan hutang.

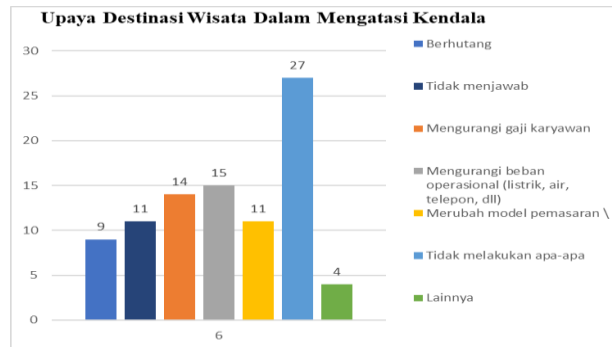
Diagram 8. Kendala yang dialami Usaha Wisata Saat Pandemi Covid-19



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Bagaimana usaha wisata tersebut dalam menyikapi kendala yang ada ? Mayoritas (29,7%) mengatakan tidak melakukan apa-apa, 16,5% dengan mengurangi beban operasional (listrik, air, telepon, dan lain-lain), 15,4% memilih untuk mengurangi gaji karyawan, 12,1 dengan merubah model pemasaran, 9,9% dengan berhutang, dan 4,4 % lainnya.

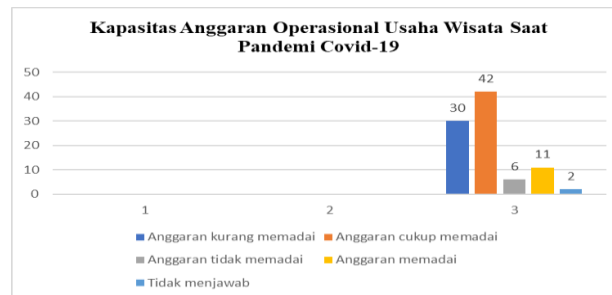
Diagram 9. Upaya Destinasi Wisata dalam Mengatasi Kendala



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Tentang bagaimana kapasitas anggaran operasional usaha wisata saat Pandemi Covid-19, diagram di bawah menunjukkan bahwa 46% anggarannya cukup memadai, 33% menyebut anggara kurang memadai, 12,1% anggaran memadai,dan 6,6% responden menyebut anggaran tidak memadai,

Diagram 10 . Kapasitas Anggaran Operasional Usaha Wisata Saat Pandemi Covid-19



Sumber: Data penelitian yang diolah, 2023

DAMPAK SOSIAL PANDEMI COVID-19 TERHADAP PARIWISATA KABUPATEN TUBAN

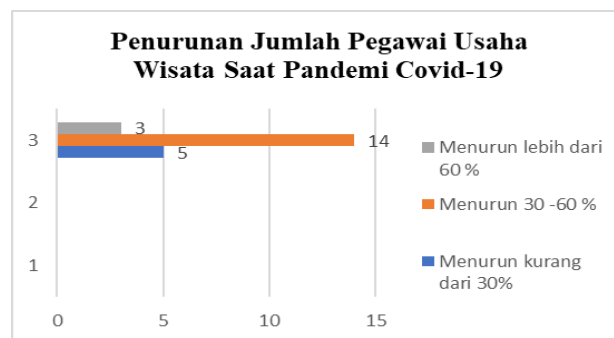
Tidak bisa dipungkiri bahwa menurunnya pendapatan setor pariwisata juga berdampak buruk pada kondisi tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Seperti tampak dalam diagram di bawah ini, ketika Pandemi Covid-19, jumlah karyawan dari usaha-usaha wisata mengalami penurunan. Paling besar, 14 usaha wisata mengalami penurunan jumlah karyawan sebanyak 30 - 60%. Kemudian 5 usaha wisata menurun kurang dari 5%, dan 3 lainnya terjadi penurunan jumlah karyawan hingga lebih dari 60%.

Diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan instruksi pemerintah pusat untuk menutup destinasi wisata di seluruh Indonesia telah menyebabkan banyak bisnis stagnan, termasuk sektor pariwisata. Ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas, perjalanan, dan karantina fisik. Karena tempat wisata memungkinkan mobilitas dan kerumunan, mereka dianggap sebagai tempat di mana virus COVID-19 dapat menyebar.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi internasional yang sangat parah. Ekonomi setiap negara mengalami pergeseran. Pergeseran dalam rantai pasokan domestik, ketidakpastian di pasar pariwisata, dan efeknya terhadap pergeseran permintaan wisata. Kunjungan wisatawan menurun karena kebijakan yang mengurangi kerumunan dan mobilitas. Akibatnya, semua pendapatan dari industri pariwisata turun. Jumlah kunjungan wisatawan turun sejak Januari 2020, dengan 173 ribu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah tertingginya adalah 400 orang pada April 2020.

Di beberapa kota, protokol kesehatan yang ketat untuk kepariwisataan diterapkan. Seperti membatasi jumlah wisatawan dari kapasitas obyek dengan jam operasional yang dibatasi, melakukan skrining persyaratan dokumen kesehatan, membatasi pengunjung restoran, mendorong calon wisatawan untuk melakukan reservasi sebelum berkunjung, atau memberlakukan syarat surat keterangan negatif COVID-19, yang merupakan hasil tes antigen yang cepat untuk wisatawan selama pandemi COVID-19.

Diagram 11. Penurunan Jumlah karyawan Obyek Wisata Pada Saat Pandemi Covid-19



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Bila dibandingkan dengan penurunan jumlah karyawan obyek wisata dengan kenaikannya, ternyata 1:1. Pada kondisi Pandemi ini, ada beberapa obyek wisata yang juga menambah jumlah karyawan. Ada 1 lokasi wisata yang mengalami kenaikan sebanyak 50% jumlah karyawannya pada saat Pandemi, dan ada 1 lokasi wisata yang naik 37,5%.

Diagram 12. Kenaikan Jumlah Karyawan Obyek Wisata Pada Saat Pandemi Covid-19



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Kondisi pandemi yang sangat sulit ini, memaksa para pengelola usaha wisata untuk mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pada intinya adalah sebagai tindakan penyelamatan terhadap nasib karyawan dan obyek wisata yang ada.

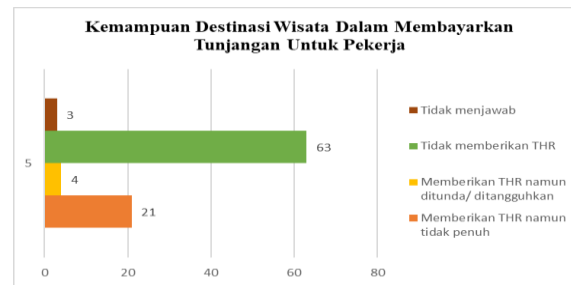
Diagram 13. Kebijakan Pengelola Usaha Wisata Terhadap Karyawan



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Terkait kemampuan pengelola usaha wisata dalam membayarkan tunjangan untuk para karyawannya, mayoritas (69,3%) tidak membayarkan Tunjangan hari Raya (THR) pada karyawannya. Sebanyak 21 pengelolaan usaha wisata (23,1%) memilih membayarkan THR, meski tidak penuh. Sedangkan 4,4% memberikan THR namun ditunda/ditangguhkan.

Diagram 14. Kemampuan Pengelola Usaha Wisata Dalam Membayarkan Tunjangan Untuk Pekerja



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2023

Pandemi Covid-19 merupakan krisis makro level kelima, yaitu wabah penyakit. Sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak adanya Pandemi Covid-19. Pandemi membuat para pelaku sektor pariwisata cukup kesulitan untuk bergerak karena adanya *kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*, dimana tidak hanya membatasi mobilitas masyarakat, namun juga mewajibkan penutupan tempat wisata di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Padahal sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar, baik itu pemasukan dari wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

Sektor pariwisata bukanlah bagian dari sektor essential dan kritikal. Tapi sektor ini menanggung puluhan juta nyawa yang bergantung hidupnya di sana. Sektor ini telah menghadirkan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional terutama dalam pendapatan daerah, pengembangan wilayah, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, penerimaan devisa maupun penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia. Kontribusi sektor pariwisata dapat ditenggarai dari berbagai aktivitas wisatawan, mulai dari penggunaan jasa transportasi darat, air maupun udara, akomodasi makanan dan minuman, cinderamata produk UMKM, penginapan, restoran dan industri kerajinan sebagainya.

Apalagi salah satu visi dan misi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 adalah mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah. Sehingga arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dengan membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2022). Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk menyikapinya.

Menghadapi kondisi krisis sebagai dampak wabah penyakit Covid-19 ini, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah :

Pertama, membentuk organisasi dengan mandat, dengan legalitas. Sehingga organisasi ini bisa bergerak dengan baik sesuai kebutuhan. Bentuk organisasi juga harus didesain secara fleksibel sehingga memiliki kemampuan untuk mengakses dan diakses oleh pihak terkait, baik pada saat krisis maupun pasca krisis,

Kedua, menyusun manual untuk mengelola krisis, seperti yang peneliti paparkan dalam tabel di bawah ini :

Jenis Krisis : Wabah Penyakit Covid-19		
Tahap	Tugas Kemenpar	Tugas
Pra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai manual penanganan krisis wabah penyakit Covid-19 2. Mempunyai database penyebaran wabah penyakit Covid-19, dan apa tindakan yang telah dilakukan dalam menganganinya 3. Menyiapkan kemampuan koordinasi, supervisi, dan komuniaksi pada saat kejadian 4. Menyiapkan kebijakan “Pariwisata di Saat Krisis” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riset, dokumentasi 2. Pelatihan 3. Pembuatan kebijakan
Pada saat	<p>Berkoordinasi dengan Kementrian/Lembaga terkait, khususnya BPPT (D) dan Pemda, termasuk penyiapan kebijakan dan operasional di lapangan, dan pelaku usaha di destinasi, baik pelaku di bidang atraksi (daya tarik destinasi wisata), amenitas (layanan akomodasi dan konsumsi di destinasi), akses (akses ke dan dari destinasi, serta ansilaritas, seperti sistem pendukung kenyamanan destinasi, seperti telekomunikasi, perbankan dan keuangan, dan jasa pendukung lainnya, termasuk perlindungan keamanan manusia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan supervisi di lapangan, khususnya kepada pelaku usaha pariwisata dalam menangani wisatawan 2. Mengkomunikasikan kejadian krisis sehingga tidak ada satupun yang merasa “ditinggalkan”, dan memastikan tidak ada jaringan komunikasi yang “hilang” atau “putus” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi 2. Supervisi 3. Komunikasi
Pasca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendokumentasian 2. Pembelajaran 3. Pengembangan <i>best practices</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi, dokumentasi 2. Sosialisasi 3. Metodologisasi

Ketiga, menyiapkan sumber daya manusia pengelola Lembaga manajemen krisis yang mempunyai kapasitas kognitif, profesional, dan passion untuk menjalankan organisasi. Karena itu SDM yang ada di Lembaga ini harus memiliki pengeathuan tentang krisis pariwisata, manajemen krisis pariwisata dan semangat untuk menangani krisis.

Keempat, menyiapkan lembaga terkait, sesuai dengan relevansi, untuk merespon setiap krisis pada jenjang yang relevan dihadapi. Dalam kaitan ini adalah Dinas Pariwisata daerah dan jaringan kerja Kemenpar di setiap daerah.

Kelima, membangun jaringan krisis pariwisata, sesuai dengan relevansi, di jajaran kabinet pemerintahan, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media massa, dan masyarakat penggiat pariwisata, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

KESIMPULAN

Bisnis pariwisata harus terus beradaptasi karena sektor ini sering mengalami peningkatan kasus COVID-19. Selain itu, peningkatan kinerja ekonomi dan penanganan COVID-19 harus bekerja sama. Ekonomi dengan sendirinya akan bangkit jika pandemi terkendali dan masyarakat sehat. Menjaga keseimbangan antara perekonomian dan kesehatan bukanlah hal yang mudah. Tidak bijaksana untuk mempercepat ekonomi sambil menghasilkan peningkatan kasus dan kluster COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashoer, M., Revida, E., Dewi, I. K., Simarmata, M. M. T., Nasrullah, N., Mistriani, N., Samosir, R. S., Purba, S., Islahuddin, I., & Meganingratna, A. (2021). *Ekonomi Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Ayu, M., Nariswari, S., Bagus, I., & Putra, W. (2021). Implikasi Kebijakan Psbb Dan Protokol Kesehatan Covid-19 Terhadap Minat Wisatawan Berkunjung Ke Bali. *Jurnal Kertha Desa*, 9(5), 45–57. <https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC87u1slwjNQ5nU8fRKzF7kEMHJ>
- Azizah, K. N. (n.d.). *Update COVID RI 13 Desember: Tambah 2.117 Kasus Baru, 32 Meninggal*. 13 Desember 2022. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6459549/update-covid-ri-13-desember-tambah-2117-kasus-baru-32-meninggal>
- Institute, S. R. (n.d.). *Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran Penelitian Kebijakan*. 2021. <https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>
- Jawa Pos Radar Tuban. (n.d.). Target Kunjungan Wisata Tahun Ini Hanya Naik 5 Persen. 27 Desember 2022. <https://radartuban.jawapos.com/wisata-kuliner/09/03/2022/target-kunjungan-wisata-tahun-ini-hanya-naik-5-persen/>
- Laucereno, S. F. (n.d.). *Banyak Negara yang Krisis Gara-gara Pandemi, RI Mesti Gimana?* 13 Oktober 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6346126/banyak-negara-yang-krisis-gara-gara-pandemi-ri-mesti-gimana>
- Nugraha, Y. E. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Pada Unit Usaha Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kota Kupang. *Jurnal Industri Pariwisata*, 3(2), 134–149. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v3i2.411>
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Pariwisata : Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

- Paludi, S. (2022). Setahun Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Industri Pariwisata Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 49–60. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4337>
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2021*. <https://tubankab.go.id/files/SAKIP/2022/lkjip-kabupaten-tuban-tahun-2021.pdf>
- Pradana, Muhammad Iqbal Wahyu & Mahendra, G. K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 3(2), 6.
- Sicca, S. P. (n.d.). *Pandemi Covid-19 Belum Selesai, Vaksin dan Prokes Diperlukan*. 7 November 2022. <https://health.kompas.com/read/2022/11/07/161300168/pandemi-covid-19-belum-selesai-vaksin-dan-prokes-diperlukan?page=all>
- Soehardi, S., Permatasari, D. A., & Sihite, J. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Tempat Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.216>
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>
- Tuban, K., Timur, J., Boom, P., Tuban, G. A., & Tuban, K. (2019). *PAD Tiga Sektor Wisata Tuban Bumi Wali Lampau Target*. 2018–2020.
- Utami, B. S. A., & Kafabih, A. (2021). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 383–389. <http://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/121>